



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANANG CAHYA PERMADI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **221183**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/30 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/36 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
5. Tanah Seluas 595 m2 di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 1700 m2 di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.250.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
3. MOTOR, VARIO D1A02N18M1 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.069.167



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.010.319.167
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.010.319.167

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.